

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi masalah umum di berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Dan kemiskinan merupakan masalah yang komprehensif dan saling terkait yang mempengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi dan politik, dan tidak memiliki akses ke aspek ekonomi, sosial, politik dan psikologis. Selain itu, masalah kemiskinan juga disebabkan oleh banyaknya penduduk yang masuk dalam kategori pengangguran yang tidak produktif dalam bekerja. Banyak keluarga Indonesia yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesadaran akan kehidupan masyarakat Indonesia yang kesejahteraan dan sumber daya manusianya masih rendah dan kualitas hidupnya masih rendah disebabkan oleh tingkat pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Kemiskinan juga dapat menghambat pembangunan negara dan, sebagai akibatnya, mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap hak asasi manusia.²

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin akan terwujud agar masyarakat miskin dapat hidup layak, meningkatkan kualitas hidupnya dan memenuhi fungsi sosialnya dengan baik. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sebab, jika fungsi sosial berhasil, juga dapat meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu,

² Wisnu Indrajid VO Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan)*. (Malang :IntransPublishing, 2016).hlm. 25.

kemiskinan dipahami tidak hanya sebagai ketidakmampuan finansial, tetapi juga sebagai pelanggaran hak-hak dasar dan perlakuan diskriminatif individu atau kelompok orang dalam kehidupan yang layak. Hak-hak dasar yang biasa disebut meliputi pemenuhan kebutuhan gizi, kesehatan dan pendidikan yang rasional bagi umat manusia, termasuk isolasi/isolasi sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.³

Tingkat kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap tingginya pengangguran seperti halnya keterbelakang serta keterpurukan yang ditimbulkan karena adanya suatu pergantian sosial antara lain : adanya perubahan dari segi sosial ekonomi yang disertai dengan bertambahnya jumlah penduduk, akan tetapi pendapatan tidak seimbang dengan kebutuhan pokok, adanya musibah akibat bencana alam, sekaligus adanya pemutusan rantai pekerjaan. Maka dari itu, penanggulangan kemiskinan sudah sebagai titik utama yang diperhatikan untuk aplikasi dalam hal pembangunan suatu daerah. Bank Dunia melalui laporannya *Development Report on Poverty* menyatakan bahwa dalam menanggulangi kemiskinan harus memperhatikan tiga hal yaitu :

1. Perkembangan ekonomi yang luas serta padat sehingga dapat menciptakan peluang kerja serta pemasukan untuk masyarakat tidak mampu.
2. Mengembangkan SDM (pembelajaran, kesehatan serta gizi) yang dapat memberikan suatu keahlian yang lebih bermanfaat dengan menggunakan peluang - peluang serta fasilitas yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³ Pandu Baniadi dan Mustofa, Kemiskinan Multidimensi (*Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 15, No. 01, 2018).hlm. 13-15.

3. Pembuatan fasilitas jaringan pengaman sosial untuk penduduk miskin yang tidak memperoleh peluang dalam pengembangan SDM akibat ketidakmampuan raga dan mental, musibah serta konflik sosial.⁴

Dalam pandangan Al-Qur'an kemiskinan ialah suatu keadaan yang timbul karena adanya suatu aspek baik itu aspek eksternal ataupun aspek internal. Aspek internal tertuju pada pengaktualisasian kemampuan pada diri manusia, termasuk pada lemahnya fisik serta psikis yang ada pada diri mereka. Sedangkan aspek eksternal tertuju pada suatu keadaan alam sosial serta struktural yang dapat menimbulkan terbentuknya kemiskinan.⁵ Dan kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya untuk penanggulangan kemiskinan, yang mencakup beberapa faktor seperti faktor politik, budaya, ekonomi ataupun sosial. Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan sekaligus kemiskinan. Islam telah memerintahkan kepada umatnya untuk selalu membantu sesama maupun membantu fakir miskin sesuai dengan (*Q.S Al-Insan: 5-9*)

يُوفُونَ بِاللَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا * إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا

مُسْتَطِيرًا * وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا شَرُّهُ

Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur, (5) (yaitu) mata air (dalam surga) yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat mengalirkannya dengan sangat lancar. (6) Mereka memenuhi nazar dan takut akan datangnya suatu hari yang adzabnya merata di mana-mana. (7) Dan mereka memberikan makanan kesukaannya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, (8) (sambil berkata), “Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena

⁴ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah, Edisi Revisi* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2016). hlm. 70.

mengharap ridha Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. (9) – (Q.S Al-Insan: 5-9).

Dan penanggulangan kemiskinan tidak hanya tertuju pada satu faktor saja, melainkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Begitupula kesejahteraan, merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negeranya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, serta kehidupan sosial bagi dirinya, keluarga, serta masyarakat⁵. Sedangkan dalam Islam bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan cara bekerja, jaminan hidup dari saudara yang beruntung dalam memperoleh harta, barang, zakat dan jaminan dari Baitul mal. Sebab bekerja merupakan suatu usaha untuk mendapatkan kekayaan dan memakmurkan kesejahteraan hidup. Sedangkan jaminan hidup dari saudara merupakan upaya dalam mengatasi sekaligus menyelamatkan dari penderitaan kemiskinan. Dan jaminan dari Baitul Mal pada dasarnya ialah sumber ekonomi untuk warga fakir.

Kabupaten Lamongan ialah kabupaten yang terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Secara Administrasi Kabupaten Lamongan memiliki 19 kecamatan dengan 257 desa serta 14 kelurahan. Dan di Kabupaten Lamongan mempunyai angka kemiskinan yang tidak lumayan besar. Kemiskinan itu sendiri cenderung lebih susah diatasi apabila tidak diimbangi dengan kinerja serta komitmen pemerintah dengan inovatif dan efisien.⁶

⁵ Ardio Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta Deepublish CV. Budi Utama, 2017). hlm.3-4.

⁶ BPS Kabupaten Lamongan, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamongan 2020 / 2020* (Lamongan: CV. Azka Putra Pratama, 2020). hlm.57-58.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Penduduk Miskin di Kabupaten Lamongan 2017 -2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	PresentasePenduduk Miskin(%)
2017	171,38	14,42
2018	164,00	13,80
2019	157,11	13,21
2020	164,68	13,85
2021	166,82	13,86

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan 2017-2021

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamongan terbilang masih cukup rendah hal tersebut bisa dilihat dari tahun ketahun. Selama tahun 2017 sampai tahun 2021 penduduk miskin yang ada di Kabupaten Lamongan terus mengalami penurunan tercatat jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sejumlah 171,38 jiwa (14,42%). Pada tahun 2018 saja jumlah penduduk miskin menurun drastis sejumlah 164,00 jiwa (13,80%). Dan pada tahun 2021 terus mengalami penurunan sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 166,82 (13,86). Dan kategorisasi masyarakat miskin sendiri menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia beserta Badan Pusat Statistik, berdasarkan konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan. Yaitu Keluarga Pra- Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera I (KS-I), Keluarga Sejahtera II (KS-II), Keluarga Sejahtera III (K-III), Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus). Kelompok Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) inilah yang kemudian dikategorisasi oleh Bappenas sebagai penduduk miskin. Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) merupakan kelompok keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara minimal, semisal kebutuhan pokok (pangan),⁷ sandang, papan, kesehatan,

⁷ Rosni, " Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", (*Jurnal Geografi* : Volume 09, No 01, 2017), hal. 57-58.

pendidikan, serta keagamaan. Sedangkan Keluarga Sejahtera I (KS-I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi semisal kebutuhan sekunder.

Tabel 1.2

Data Kesejahteraan Keluarga Desa Laren tahun 2017 – 2021

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Keluarga Prasejahtera	410	589	681	681	581
2	Jumlah Keluarga Sejahtera 1	198	219	989	989	389
3	Jumlah Keluarga Sejahtera 2 Plus	1231	976	706	506	817

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan 2017-2021

Dari tabel 1.2 tersebut diperoleh informasi bahwa jumlah keluarga prasejahtera dari tahun 2017 - 2018 mengalami kenaikan dari jumlah 423 menjadi 581 dan dari tahun 2017 - 2020 jumlahnya masih tetap. Akan tetapi jumlah Keluarga Sejahtera I dari tahun 2017- 2018 mengalami kenaikan dari jumlah 108 menjadi 289 dan dari tahun 2018 - 2020 jumlahnya juga masih tetap. Selanjutnya untuk jumlah Keluarga Sejahtera 2 Plus mengaami penurunan yangawalya ditahun 2017 1246 di tahun 2016 menjadi 906 dan dari tahun 2017-2020jumlahnya juga masih tetap.⁸

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dalam upaya mensejahterkan masyarakat,salah satunya dengan membuat kebijakan pro masyarakat miskin yang diwujudkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2007. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku pimpinan koordinasi “Penanggulangan Kemiskinan,Nomor 31/ KEP/ MENKO/ KESRA/ IX/ 2007” bahwa sistem sosial tertuju pada kesehatan serta pembelajaran dalam upaya untuk

⁸ BPS Kabupaten Lamongan,*Kecamatan Lamongan Dalam Angka Kabupaten Lamongan*, (Lamongan : CV. Azka Putra Pratama,2020),.hlm.18-20.

menanggulangi kemiskinan lewat pemberian dorongan tunai bersyarat.

Dalam jangka pendek PKH diharapkan sanggup menolong keluarga miskin sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah dengan adanya PKH diharapkan sanggup memberikan layanan kesehatan sekaligus pembelajaran. Dan dalam jangka panjang diharapkan bisa memutuskan rantai kemiskinan serta mensejahterakan masyarakat miskin.⁹ Dan diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan mensejahterakan masyarakat yang selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Namun pada poin intinya sebenarnya program ini adalah bentuk program yang diberikan guna meningkatkan kesejahteraan melalui beberapa bentuk program bagi masyarakat miskin yang sudah terdaftar secara sah sebagai penerima PKH. Implikasi akhirnya adalah peningkatan kualitas kehidupan sosial Keluarga Sangat Miskin (KSM), yang dilakukan secara bersamaan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, serta berbagai bentuk program bantuan lain seperti Jamkesmas, Raskin, Bantuan Tunai maupun Bantuan Non-Tunai dan lain-lain.

Adapun tujuan dikeluarkannya Program Keluarga Harapan ini berfokus pada memutus rantai kemiskinan bagi generasi berikutnya serta memperbaiki taraf hidup masyarakat yang secara esensial menyangkut tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial sendiri merupakan sebuah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan materi dan non-materi. Program keluarga harapan (PKH) diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Padahal kesejahteraan

⁹ Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam (*Jurnal Equilibrium*, Vol. 03, No.02, 2015).
hlm.13.

sosial sangat perlu diperhatikan karena jika kesejahteraan sosial terwujud dengan baik maka dapat tercipta kehidupanlayak, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Tabel 1.3

Peserta PKH Desa Laren 2017-2021

Tahun	Jumlah Peserta PKH
2017	35 Peserta PKH
2018	68 Peserta PKH
2019	161 Peserta PKH
2020	158 Peserta PKH
2021	192 Peserta PKH

Sumber : Laporan Dinas Sosial 2017

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa persentase RTM penerima manfaat PKH di Desa Laren pada tahun 2017 tahap pertama berjumlah 35 peserta dan di tahun 2017 sampai di tahun 2019 terus mengalami kenaikan di tahun 2020 berjumlah 158 peserta PKH. Dan pada tahun 2021` berjumlah 192 peserta. Dari data diatas setiap tahunnya persentase RTM penerima manfaat PKH terus mengalami kenaikan. Maka dengan adanya program keluarga harapan (PKH) diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Akan tetapi Program Keluarga Harapan bukanlah suatu proses pengentasan kemiskinan yang mudah dilakukan, melainkan sebuah proses yang membutuhkan kemampuan yang baik, baik dari pemerintah maupun dari komponen masyarakat terutama masyarakat miskin. Sebab belajar dari pengalaman berbagai program penanggulangan kemiskinan yang pada kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan karena tidak benar-benar di implementasikan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Dan tujuan utama dibentuknya program PKH sejak tahun 2007 adalah untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, hampir sepuluh tahun bantuan PKH diberlakukan di Indonesia tetapi belum dapat mengurangi angka kemiskinan. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Muhtadin juga menyampaikan dalam jurnal nya yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Pendidikan dan Kesehatan (Studi Kasus Desa Jati Sawit Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu)” bahwa bantuan PKH untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam aspek pendidikan dan kesehatan hanya sebagai stimulan saja kepada peserta, dana tersebut menurut peneliti belum bisa memutuskan mata rantai kemiskinan melalui aspek pendidikan dan kesehatan, sebab bantuan tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan peserta PKH Desa Jatisawit Lor.¹⁰

Oleh karena itu, inilah yang kemudian menjadi hal menarik untuk dilakukan analisis lebih mendalam dalam penelitian ini guna mendapatkan hasil tentang bagaimana kemudian Program Keluarga Harapan ini diterima dan dirasakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan selama ini. Dari penjabaran diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mensejahteraan Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Laren**

¹⁰ Muhtadin “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Pendidikan dan Kesehatan (Studi Kasus Desa Jati Sawit Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu)”.(IAIN Syekh Nur Jati Cirebon,2019),hlm. 09-12.

Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas,maka perlu dipaparkan dalam suatu fokus penelitian untuk memberikan arah terhadap ulasan berikutnya.. Adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat miskin di Desa Laren Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?
2. Bagaiman implementasi Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat miskin di Desa Laren Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dalam perspekif ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas,maka penelitian ini bertujuan :

1. Mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat miskin di Desa Laren Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
2. Menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat miskin di Desa Laren Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dalam perspektif ekonomi islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberikan kajian serta informasi tentang penerapan pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) serta diharapkan mampu memberikan

informasi mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Laren, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan untuk mensejahterakan masyarakat miskin ditinjau dalam perspektif ekonomi islam.

- b) Memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga diharapkan dapat menjadi khasanah dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya dalam pengaplikasian kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat miskin dengan benar dan tepat sasaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penerima PKH

Manfaat penelitian ini mampu menambah wawasan mengenai tingkat kemiskinan, mengerti proses penyaluran dan pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan sosial dalam perspektif ekonomi Islam.

a) Bagi Pelaksana PKH

Sebagai salah satu rujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendampingan kepada penerima PKH.

b) Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan, kesehatan dan pendidikan

c) Bagi Pemerintah

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan

yang terkait dengan program keluarga harapan atau program pengentasan kemiskinan dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada dimasyarakat.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh biaya produksi, jumlah pekerja dan harga produk terhadap pendapatan usaha.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan munculnya berbagai penafsiran terhadap judul penelitian “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Laren Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan” maka penulis memberikan definisi istilah terhadap kosa kata tertentu yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penegasan konseptual

a. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Dengan kata lain, Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan

melaksanakan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh para penerima manfaat Program Keluarga Harapan.¹¹

b. Kesejahteraan Masyarakat

Midgley (dalam Sutomo, 2006: 12) memperjelas bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun atas tiga unsur yaitu: pertama, setinggi apa masalah sosial dikendalikan; Kedua, seluas apa kebutuhan dipenuhi, dan Ketiga, setinggi apa kesempatan bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.¹²

c. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-Jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perspektif ekonomi Islam adalah sudut pandang seseorang jika dilihat dari dasar-dasar tentang ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.¹³

2. Penegasan Operasional

Alur dari pembahasan ini yaitu untuk membahas mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Laren Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Agar variabel dalam penelitian ini

¹¹Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Program Keluarga Harapan" dalam <http://www.kemosos.go.id> diakses pada hari Kamis tanggal 10 November 2021 pada pukul 14.43 WIB.

¹²Soetomo, 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

¹³Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana, (*Jurnal Administrasi Publik*, Volume I No 1 tahun 2010, hal 1.

dapat diteliti, diamati dan diobservasi (diamati), maka perlu dirumuskan terlebih dahulu definisi operasionalnya. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada sifat yang mudah diamati, mempunyai rumusan yang jelas dan pasti serta tidak membingungkan. Definisi operasional merupakan unsur penting dalam penelitian, karena melalui definisi operasional maka seorang peneliti bisa menyusun, mengamati dan meneliti dengan tepat dan akurat. Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan dalam proses penelitian ini, yang dibahas didefinisikan secara operasional sebagai berikut:¹⁴

a) Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai :

- 1) Penyaluran bantuan dan pembayaran
- 2) Peran pendamping sebagai sumber daya atau pelaksana PKH yang terjun langsung dalam masyarakat.
- 3) Proses pendataan yaitu verifikasi dan pemuthakiran data.
- 4) Kemudahan akses pelayanan dasar berupa pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- 5) Kendala Pelaksanaan PKH

b) Kesejahteraan Masyarakat mengenai :

- 1) Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti makanan, tempat tinggal dan perlindungan.
- 2) Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih

¹⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), edisi I, cetakan IV, hal 24-25

banyak, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan,

- 3) Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan.

c) Perspektif Ekonomi Islam mengenai:

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Laren menurut Ekonomi Islam dapat dilihat dari prinsip – prinsip dasar Ekonomi Islam yaitu:

- 1) Tauhid
- 2) Adil
- 3) Nubuwwah
- 4) Tabliq
- 5) Khilafah
- 6) Ma'ad

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi dengan Judul “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Laren Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan” akan disusun peneliti sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat hasil penelitian, definisi istilah (konseptual dan operasional), dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang kajian kepustakaan mengenai program keluarga harapan, kesejahteraan masyarakat, konsep ekonomi islam dalam mensejahterahkan masyarakat, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini di dalamnya berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data mengenai implementasi Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat miskin di Desa Laren Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dan implementasinya menurut prespektif ekonomi islam.

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian tentang implementasi Program Keluarga

Harapan dalam mensejahterakan masyarakat miskin di Desa Laren Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

BAB VI : PENUTUP

Bagian akhir dalam skripsi yang memaparkan kesimpulan yang diperoleh melalui hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah dilaksanakan.